

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS ESELON I
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan kendaraan roda empat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjamin tertibnya pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - c. bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penanggungjawab kendaraan dinas pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan keputusan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penanggungjawab Kendaraan Dinas Eselon I.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS ESELON I PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai
penanggungjawab kendaraan dinas dengan ketentuan
sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kegiatan
operasional dinas maka pemeliharaan menjadi tanggung
jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
- c. Kerusakan kendaraan dinas yang disebabkan karena
penggunaan diluar kepentingan dinas maka menjadi
tanggung jawab yang bersangkutan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : ..13... Mei 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 112 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 Mei 2016

No.	PENANGGUNGJAWAB	JABATAN	KENDARAAN			KETERANGAN
			JENIS	MEREK/TIPE	NO POLISI	
1	Agus Prabowo	Kepala LKPP	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1421 SQA	
2	Salusra Widya	Sekretaris Utama	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1427 SQA	
3	Robin Asad Suryo	Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1422 SQA	
4	Sarah Sadlqa	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1424 SQA	
5	Dharma Nursani	Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1423 SQA	
6	Ikkak Gayuh Patriastomo	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengkah	Roda 4	Toyota/Camry 2.5V AT	B 1426 SQA	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



AGUS PRABOWO